

KEYNOTE SPEECH – Airlangga Hartarto

Strategi Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi COVID-19

Quote: “Kita (pemerintah) berharap bahwa seluruh *stakeholders* akan bekerja sama, bergotong royong agar stabilitas ini tetap terjaga, baik dari segi kesehatan maupun dari segi sosial-ekonomi”

Perekonomian Indonesia di tahun 2020 secara umum mengalami penurunan sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Meski demikian, data yang ada menunjukkan bahwa Indonesia mengalami pemulihan yang lebih cepat dibandingkan negara-negara lain, sehingga pandemi ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk membangkitkan kembali perekonomian Indonesia. Tahun ini, Forum Indonesia Economic Outlook’21 membahas isu tersebut dengan mengangkat tema “Post-Pandemic Recovery: A Resurgence of Indonesia’s Economy”. Dalam acara yang telah berlangsung pada Sabtu (14/11) ini, hadir Dr. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T. selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI untuk memberikan *keynote speech* mewakili Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus membuka jalannya acara.

Pemaparan Airlangga diawali dengan meng-*assess* kondisi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Pandemi yang telah menjangkiti 53 juta masyarakat dunia ini menyebabkan tekanan di seluruh aspek, baik di sektor kesehatan maupun ekonomi. Sebanyak 215 negara mengalami kontraksi ekonomi, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi global berada di antara -4,4% s.d. -5,2%. Tentunya, kontraksi ekonomi ini menyebabkan terjadi peningkatan pengangguran maupun kemiskinan. Namun, di tengah semua ini, *recovery rate* Indonesia sudah membaik dan sekarang berada di sekitar 84,4%, sebuah angka yang lebih tinggi dari rata-rata kesembuhan global. Hal ini, menurutnya, merupakan sinyal positif di tengah pelonggaran aktivitas masyarakat, seiring dengan protokol kesehatan yang harus terus dijaga.

Saat ini, pandemi COVID-19 di dunia telah memasuki *second wave*, seperti di Eropa dan Amerika. Di triwulan ketiga 2020 ini, perekonomian Indonesia telah terlihat berada pada tren positif, sehingga dapat dipastikan bahwa triwulan kedua yang merupakan *rock bottom*/titik nadir sudah terlewati. Tren pertumbuhan positif juga terjadi di negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika. Pertumbuhan positif ini memunculkan harapan bagi Indonesia dan dunia agar pemulihan ekonomi di paruh kedua 2020 semakin membaik. Beberapa langkah *extraordinary*

yang dilakukan oleh pemerintah selama pandemi sudah dapat terlihat efeknya, dengan berbagai indeks termasuk indeks saham sudah mencapai level seperti sebelum adanya pandemi. Selain itu, aktivitas *Purchasing Managers Index* (PMI) beberapa negara sudah berada di atas 50 dan Indonesia sendiri sedang menuju angka 50. Momentum pertumbuhan ini diharapkan bisa terus dijaga sampai dengan triwulan keempat, di mana pertumbuhan ekonomi diproyeksikan antara -1,6% s.d. 0,6%.

Dari sisi pengeluaran, pada triwulan ketiga 2020, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 9,76%. Ini menjadi penopang untuk pertumbuhan di triwulan ketiga yang hampir seluruhnya berada di jalur hijau dan diharapkan bisa berlanjut ke triwulan keempat. Beberapa sektor yang masih bertahan dengan tren positif antara lain sektor pertanian (2,15%); pengadaan air, sampah, dan limbah daur ulang (6,04%); informasi dan komunikasi (10,61%); serta kesehatan (15,33%). Selain PMI yang sudah disebutkan tadi, penjualan eceran, survei kegiatan usaha, serta penjualan kendaraan bermotor juga memiliki tren positif dari triwulan ke triwulan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sendiri sudah mengalami *rebound* dari angka terendahnya di bulan Maret, demikian pula kita melihat bahwa beberapa sektor juga sudah melakukan pembalikkan.

Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Pandemi Covid-19

Tingkat pengangguran di Indonesia masih berada di angka 29,12 juta orang, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Mayoritas penganggur ini mempunyai pendapatan rendah, sehingga hal ini harus dijaga pemerintah agar kemiskinan tidak bertambah. Saat ini, pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, melalui komite yang telah dibentuk dengan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020. Di sisi ekonomi, program yang dijalankan berupa anggaran stimulus untuk enam sektor, yaitu: sektor kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dukungan UMKM, lembaga program korporasi, dan dukungan ekonomi melalui program kementerian/lembaga sektoral dan pemerintah daerah. Kebijakan anggaran stimulus ini akan berlanjut hingga tahun 2021.

Di sisi kesehatan, pemerintah terus melakukan program 3T yaitu *testing*, *tracing*, dan *treatment*. Kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan juga dijaga melalui program 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pemerintah juga mendorong dilaksanakannya Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 terkait dengan pengadaan vaksin. Realisasi anggaran telah mencapai 53%, dengan anggaran terkait klaster perlindungan

sosial terealisasi sebanyak 86,89% dan UMKM terealisasi 75,81%. Ini sesuai dengan daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah juga telah memberikan bantuan berupa subsidi upah, di mana subsidi upah ini diberikan dengan anggaran Rp37,87 triliun dan target pekerja sebanyak 15,7 juta orang. Bantuan lain adalah Banpres Produktif yang diperluas hingga 2 Desember 2020.

Di sektor keuangan, sebagai upaya meningkatkan produktivitas masyarakat, pemerintah melakukan penempatan dana di bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) sebesar Rp47,5 triliun dan kredit yang siap disalurkan sebesar Rp188,03 triliun. Selain di bank-bank Himbara, pemerintah juga melakukan penempatan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bank syariah. Dengan kemudahan untuk mendapatkan dana, diharapkan UMKM dan korporasi yang sifatnya padat karya dapat terjamin keberlangsungannya. Pemerintah juga melakukan mitigasi risiko, terutama dengan relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit, sehingga pelaku usaha dapat melanjutkan kegiatan usahanya di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan lainnya yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikhususkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga mendorong agar terjadi transformasi ekonomi ke arah digital. Strategi pemanfaatan teknologi informasi ini didukung oleh rencana pengadaan kawasan ekonomi berbasis digital, pembangunan SDM yang unggul di bidang ekonomi digital, sekaligus pembukaan kesempatan untuk membangun *data center*.

UU Cipta Kerja, Undang-Undang yang Dibutuhkan Masyarakat

Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah berharap bahwa undang-undang ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Data menunjukkan bahwa lebih dari 13 juta orang setiap tahunnya membutuhkan pekerjaan. Angka ini terdiri dari 6,9 juta orang yang merupakan pengangguran, 3,5 juta orang yang di-PHK atau dirumahkan, dan 3 juta angkatan kerja baru yang membutuhkan lapangan kerja, yang terbagi lagi menjadi 1,7 juta lulusan perguruan tinggi dan 1,3 juta lulusan SMA/SMK. Tentunya, sektor padat karya menjadi penting untuk menampung tenaga kerja tersebut. Sehubungan dengan UU Cipta Kerja sendiri, pemerintah telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan di dalam *implementing regulation* ataupun peraturan turunan dari undang-undang ini, baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden (Perpres). Selain itu, pemerintah juga terus mengupayakan agar sektor-sektor yang bisa mengangkat perekonomian didorong secara maksimal pada triwulan keempat 2020, termasuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akan dilanjutkan hingga triwulan pertama tahun 2021.

Sebagai penutup, Airlangga menyampaikan bahwa momentum pemulihan ekonomi domestik harus terus kita jaga dengan melihat stabilitas perekonomian, politik, dan juga upaya jangka pendek maupun jangka menengah. Tentunya, pemerintah berharap bahwa seluruh *stakeholders* akan bekerja sama dan bergotong royong agar stabilitas ini tetap terjaga, baik dari segi kesehatan maupun dari segi sosial-ekonomi.